

BAB II

SEJARAH DAN DINAMIKA HUBUNGAN KOREA SELATAN DAN KOREA UTARA

Bab ini akan menjelaskan bagaimana sejarah terpecahnya Korea. Di mulai saat masa kolonialisasi yang dilakukan Jepang dan bagaimana kekalahan Jepang yang megakibatkan Jepang harus melepaskan Korea dari wilayah jajahannya. Bab ini juga menjelaskan bagaimana awal mula terpecahnya Korea akibat perbedaan Ideologi disaat Amerika Serikat datang ke Korea bagian Selatan dan menyebarkan ideologi Kapitalis dan Uni Soviet yang menyebarkan ideologi Komunis di Korea bagian Utara. Kemudian, Bab ini akan diakhiri dengan penjelasan singkat mengenai dinamika hubungan Korea Selatan dan Korea Utara.

A. Sejarah Terpecahnya Korea

1. Kolonialisasi Jepang (1910-1945)

Ada tiga fase dimana periode imperialisme Jepang di Korea. Fase tersebut saling terkait antar satu sama lain karena akan dimulai dengan penjelasan awal mula Jepang menguasai Korea dan diakhiri bagaimana kekalahan Jepang pada Perang Dunia II yang membuat Jepang akhirnya harus meninggalkan Korea.

Fase pertama merupakan fase pemerintahan militer yang terjadi pada tahun 1910-1919. Awalnya, Jepang mengirimkan seroang Jendral militer yang diberikan perintah untuk menduduki dan menguasai korea. Jendral militer tersebut diberikan kekuatan secara mutlak dan langsung oleh Kaisar Jepang. Jepang mengirimkan seorang Jendral militer ke Korea dengan tujuan untuk mengawasi Korea secara ketat

untuk mempermudah mobilisasi polisi dan juga militer untuk menguasai Korea secara penuh. Militer Jepang dilengkapi dengan senjata yaitu pedang guna untuk memberikan rasa takut kepada rakyat Korea sehingga rakyat Korea tidak memiliki pilihan lain selain mematuhi Jepang.

Pada fase pertama, semua kegiatan yang berkaitan dengan politik dilarang secara paksa oleh pemerintah Jepang. Disisi lain, pada tahun 1912 ada sekitar lebih dari 50.000 patriot yang ditangkap dan sekitar 140.000 rakyat Korea ditahan dengan alasan mereka tidak kooperatif dengan pemerintah. Selain itu, Jepang memutuskan untuk mengekspansi daerah kekuasaan yang awalnya hanya berfokus pada daerah perkotaan dan meluas menjadi daerah pedesaan juga. Jepang bahkan menguasai sektor industri dan juga pasar uang Korea. Jepang mendapatkan banyak keuntungan, dibuktikan dengan meningkatnya hasil industri Jepang hingga sepuluh kali lipat dari sebelumnya pada tahun 1917. Tidak hanya itu, Jepang bahkan mengeskplotasi ekonomi Korea sehingga banyak masyarakat Korea yang memutuskan untuk bermigrasi ke Manchuria sekitar tahun 1919 (Yi, 1967).

Pada tahun 1920-1936 merupakan fase kedua dari Imperialisme Jepang di Koea yang dikenal dengan fase administrasi budaya. Pada fase ini, muncul gerakan kemerdekaan nasional Korea. Fase ini diawali dengan adanya kebijakan yang baik bagi Korea dengan adanya wacana untuk memberikan pekerjaan di sektor pemerintahan bagi rakyat Korea, peningkatan dalam institusi pendidikan bahkan dijanjikan akan diberikan kebebasan pers dan kebebasan untuk berkumpul. Semua hal yang dijanjikan untuk rakyat Korea hanyalah menjadi instrumen bagi Jepang untuk mengkolonialisasi Korea lebih lanjut. Korea hanya menjadi

sarana pemasok sumber makanan seperti beras dan juga hanya menjadi pasar bagi Jepang.

Jepang memberikan harapan bagi rakyat Korea dengan tujuan untuk meredam tindakan dan gerakan perlawanan dari rakyat Korea itu sendiri. Meskipun demikian, gerakan untuk melawan Jepang tetap berlanjut. Adanya perlawanan dari tentara kemerdekaan nasional yang bertempur dengan tentara dan juga polisi Jepang di Manchuria. Disisi lain, adanya kegiatan para pejuang untuk kemerdekaan Korea terus meningkat di Tiongkok. Disisi lain, munculnya sebuah gerakan yang disebut dengan *Gwangju Student Movement* yang terus melakukan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa (Yi, 1967).

Tahun 1937-1945 merupakan fase ketiga yang merupakan fase untuk menghapus identitas Korea. Fase ini terjadi saat Perang Dunia II sudah dimulai dimana Jepang pada saat itu sedang berkonflik dengan China didekat Peking pada tahun 1937. Disisi lain, Jepang juga sedang berperang di Perang Pasifik dengan Amerika Serikat sebagai musuh dengan menyerang Pearl Harbour pada tahun 1941. Perang yang dihadapi Jepang membuat Korea menjadi korban. Jepang menggunakan slogan nasional untuk melakukan mobilisasi untuk melakukan perang. Jepang memaksa rakyat Korea untuk ikut dan berpartisipasi dalam perang yang dihadapi Jepang dengan membuat seolah-olah orang Korea adalah orang Jepang yang sedang berperang.

Jepang menjadikan orang Korea menjadi orang Jepang dengan menggunakan beberapa cara seperti melarang serta menghapus segala apapun bentuk dari identitas nasional Korea (nama, bahasa, sejarah dan lain-lain). Ada ribuan generasi muda Korea yang dipaksa dan direkrut untuk berperang bersama Jepang, ribuan wanita muda yang harus

melayani dan juga menghibur prajurit yang sedang berperang. Disisi lain, orang Korea dipaksa untuk melakukan ibadah dikuil Kaisar, orang Protestan Korea dan Kristen konservatif sangat menderita karena mereka dipaksa untuk beribadah dikuil meskipun bertentangan dengan apa yang mereka percayai pada keyakinan mereka (Yi, 1967).

2. Korea setelah Perang Dunia Kedua

Korea merdeka setelah dikolonialisasi oleh Jepang selama 35 tahun lamanya. Hal tersebut dikarenakan berakhirnya Perang Dunia II yang berakhir pada 19 Agustus 1945. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II mengakibatkan bebasnya Korea dari daerah jajahan Jepang. Setelah Korea terbebas dari kolonialisasi Jepang, Uni Soviet beserta Amerika Serikat langsung mengirimkan delegasi untuk menduduki Korea. Amerika Serikat menduduki Korea dibagian Selatan, sedangkan Uni Soviet menduduki Korea bagian Utara. Ada perbedaan yang sangat signifikan saat Amerika Serikat menduduki Korea bagian Selatan dibandingkan dengan Uni Soviet yang menduduki Korea bagian Utara. Amerika Serikat membangun Korea dengan demokratis atau yang dikenal dengan Korea Selatan atau Republik Korea.

Berbanding terbalik dengan Amerika Serikat, pada agustus 1948 Uni Soviet membuat Negara yang Komunis atau yang dikenal dengan Korea Utara. Negara yang berada pada zona kependudukannya dikenal dengan DPRK atau Republik Rakyat Demokratik Korea. Kemudian, pada September 1984 delegasi **Uni** Soviet beserta Amerika Serikat pergi dan meninggalkan Semenanjung Korea dengan kondisi dimana Korea tetap terpisah menjadi Selatan dan Utara. Korea terbagi

menjadi dua dengan dua sistem bahkan ideologi yang juga berbeda karena Selatan menganut sistem Kapitalis dan Utara yang menganut sistem Komunis. Kedua Korea memiliki klaim yang sama yaitu mereka merupakan satu-satunya pemerintahan yang resmi dan sah untuk memimpin seluruh Korea (Suh, 2013).

3. Korea Utara Dibawah kontrol Uni Soviet

Awalnya, di Pyeongyang masyarakat Korea membentuk sebuah dewan yang disebut *CKPI* atau *Committee for the Preparation of Korean Independence* yang berisikan dua puluh anggota. Dewan tersebut berlokasi di Seoul dan diketuai oleh seseorang yang bernama Cho Man-sik. Mayoritas orang-orang di komite tersebut menganut agama Kristen. Meskipun, pada tahun 1945 hanya ada sekitar 2 atau 3 persen masyarakat Korea yang menganut agama Kristen pada saat itu.

Cho Man-Sik adalah salah satu pemimpin yang sangat disegani dan dihormati di Korea bahkan Cho Man-Sik dianggap sebagai pilihan yang terbaik dalam menjalankan pemerintahan di Korea Utara. Kemudian, *CKPI* melakukan kerjasama dengan Uni Soviet yang telah tiba di Pyeongyang untuk menunjuk dan memberikan kepercayaan kepada beberapa Komunis dan juga untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki oleh Cho Man-Sik (Seth, 2011, p. 309).

Uni Soviet mengorganisasi *Five Provinces People's Committee* dengan *Five Province Administrative Bureau* dalam menjalankan dan mengelola Negara bersama dengan Cho Man-Sik pada 19 Oktober. Kemudian, pada bulan November Cho Man-Sik bersama-sama dengan beberapa

pemimpin Kristen berhasil mengorganisir Partai Demokrat Korea karena keberhasilan Komunis dalam mengambil alih dan menguasai organisasi bahkan komite masyarakat setempat. Eksistensi dua partai memberikan narasi seolah-olah adanya implementasi dari multipartai meskipun pada realitanya semua kekuatan dan kekuasaan berada di bawah kendali Komunis secara penuh.

Pemerintahan saat itu dibantu dan didukung oleh ratusan orang Soviet-Korea. Soviet-Korea merupakan warga Negara Korea yang telah menjadi warga Negara resmi Uni Soviet karena mereka adalah generasi atau keturunan migrant yang sebelumnya ke Siberia. Saat pertama menjalankan pemerintahan, mereka memiliki kendala dalam memutuskan siapa pemimpin Komunis yang tepat. Ada beberapa kandidat yang dianggap memiliki peluang sebagai pemimpin. Pertama, Hyon Chun-Hyok merupakan seorang yang mandiri tetapi dianggap terlalu jauh dari jangkauan kekuasaan Uni Soviet. Kedua, Kim II dianggap kandidat paling terbaik saat itu. Kim II lahir pada tahun 1912 dari keluarga yang sederhana di Pyongyang. Ibu dari Kim II menganut agama Kristen tetapi Kim II hidup didalam keluarga yang Kristen-Protestan. Pada saat Kim II masih kecil, dia dan keluarganya memutuskan untuk bermigrasi ke Manchuria dengan tujuan untuk keluar dari kemiskinan seperti yang telah dilakukan oleh banyak orang saat itu (Seth, 2011, pp. 310-311).

Kim II berhasil meraih kesuksesan di Pochonobo bahkan Kim II sangat akrab dengan beberapa Perwira dari Uni Soviet. Setelah itu, pada November Uni Soviet telah memutuskan untuk menunjuk serta mempromosikan Kim II untuk menjadi seorang pemimpin Komunis di Korea bagian Utara. Pada 14 Oktober, Uni Soviet secara terbuka memperkenalkan Kim II sebagai pemimpin Komunis dan

memperoleh kekuasaan serta kendali Komunis setenat dengan bantuan dari *Division and War*.

Ada sekitar 311 dukungan serta bantuan yang diberikan oleh Uni Soviet sekitar tahun 1945 hingga tahun 1953. Pada saat Uni Soviet mempromosikan Kim II ada beberapa protes dan penolakan yang diberikan oleh orang Komunis tetapi telah berhasil disingkirkan oleh Uni Soviet pada Oktober 1945. Kemudian, Uni Soviet juga membentuk sebuah Biro yang merupakan sebuah Cabang Korea Utara dari Partai Komunis yang bertempat di Seoul, Korea bagian Selatan(Seth, 2011, p. 311).

4. Korea Selatan dibawah pengaruh Amerika Serikat

Ada perbedaan yang terjadi jika dibandingkan dengan situasi yang dihadapi oleh Uni Soviet dalam menduduki Korea bagian Utara. Uni Soviet cenderung memiliki situasi dan kondisi yang terorganisir serta tertib di Utara. Amerika Serikat mengalami kendala dan juga kebingungan di Korea bagian Selatan. Beberapa hal yang menjadi kendala bagi Amerika Serikat dalam menduduki wilayah bagian Selatan adalah kurangnya persiapan maupun perencanaan dan juga politik di Korea bagian Selatan yang menyebabkan kekacauan di sana. Amerika Serikat menunjuk Jendral John R. Hodge yang merupakan seorang komandan serta Korps XXIV di Okinawa untuk menduduki posisi sebagai pemimpin.

Alasan mengapa Jendral John R. Hodge ditunjuk menjadi pemimpin saat itu ialah karena Jenderal John R. Hodge dan pasukannya berada dititik paling dekaat dengan

Korea dan ditambah Amerika Serikat tidak ingin menunda dalam menyebarkan pengaruhnya di Korea. Pada 6 September, Jenderal John R. Hodge beserta dengan pasukannya tiba di Korea bagian Selatan.

Jenderal John R. Hodge merupakan seorang Jendral yang kompeten dan memiliki integritas dan ditambah dengan pengetahuan yang baik mengenai Korea. Meskipun demikian, Amerika Serikat dianggap tidak siap untuk menduduki Selatan telebih lagi mengenai masalah kependudukan. Beberapa masalah yang terjadi seperti kurangnya guru bahasa serta penerjemah yang menyebabkan orang Amerika hanya bergantung kepada orang Korea yang bisa berbahasa Inggris (Seth, 2011, p. 311).

Pasukan Amerika Serikat mendarat di Incheon pada 8 September. Dengan arahan secara lanmgsung dari Amerika Serikat, Jenderal John R. Hodge tidak menghiraukan *Korean People's Republic* atau *KPR* yang berusaha untuk melakukan pertemuan yang berlokasi di Incheon. Ketika delegasi Amerika Serikat tiba, mereka menerima sambutan serta antusias yang besar dari orang-orang Korea yang merasa senang karena berasumsi bahwa Amerika Serikat merupakan kunci dalam membebaskan Korea bagian Selatan. Antusias tersebut muncul karena Amerika Serikat yang berhasil mengalahkan Jepang sehingga menciptakan citra yang baik bagi Amerika Serikat.

Citra baik serta persepsi tersebut hilang secara cepat ketika otoritas Amerika Serikat memerintahkan Korea untuk mengikuti dan mematuhi seorang Gubernur Jendral Abe beserta 70.000 pejabat Jepang. Kemudian, pada 12 September Amerika Serikat memindahkan Abe karena

Amerika Serikat menganggap kebijakan sebelumnya merupakan sebuah kesalahan. Tiga bulan setelah kejadian tersebut. Pejabat Jepang dipulangkan ke Jepang secara bertahap. Setelah itu, kekuasaan diberikan kepada Pemerintah Miiter Amerika Serikat yang berada di Korea atau yang disebut dengan *United States Army Military Government in Korea* atau *USAMGIK*.

Masa awal pemerintahan Amerika Serikat yang berada di Selatan sangat mencerminkan bahwa Amerika Serikat tidak siap dalam membangun Korea dibagian Selatan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya perintah yang tidak jelas dari Amerika Serikat terlebih lagi pada saat awal masa pemerintahan Amerika Serikat di Selatan. Disisi lain, pejabat militer Amerika Serikat mencurigai komite masyarakat yang ada ditempatkan karena terus bermunculan sepanjang musim gugur pada 1945 kemudian dengan efektif berhasil mengendalikan mayoritas besar disektor pedesaan (Seth, 2011, p. 312).

Jendral John R. Hodge melarang keberadaan dari *KPR* pada 18 September meskipun ada dari beberapa komite masyarakat local yang tetap bertahan saat itu. Kejadian tersebut menambah angka kekacauan yang terjadi dibagian Selatan. Jenderal John R. Hodge memperkenalkan Syngman Rhee pada 16 Oktober kepada Korea yang secara tidak langsung menciptakan dukungan resmi dari Amerika Serikat terhadap pengasingan lama yang berbasis di Amerika. Berdasarkan permintaan yang diberikan oleh Jenderal John R. Hodge, Kim KU sebagai pemimpin pemerintahan sementara Korea di China serta wakil pemimpinya yaitu Kim Kyu-sik

memutuskan untuk kembali pada bulan November ke Korea (Seth, 2011, p. 313).

B. Dinamika Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara

Charles K. Armstrong mengelompokkan hubungan antar-Korea menjadi empat fase, yaitu:

1. Fase Pertama

Fase pertama ditandai dengan hubungan yang bersifat *Zero-sum game*. Fase ini berakhir pada tahun 1972 ketika terjadi yang namanya *Joint Communique*. Momen tersebut merupakan awal mula atau pertama kalinya baik Korea Selatan maupun Korea Utara berkomunikasi secara resmi. Komunikasi resmi yang dilakukan oleh kedua Korea merupakan hasil dari perubahan konfigurasi dinamika Perang Dingin di Asia Timur pada tahun 1972. Hal tersebut dikarenakan adanya pendekatan yang terjadi oleh dua Negara besar yaitu Amerika Serikat dan China yang pada akhirnya mempengaruhi kedua Korea.

2. Fase Kedua

Fase kedua merupakan fase yang disebut dengan fase *dialog on-off* yang pada akhirnya memuncak pada momen ketika ditandatanganinya *Basic Agreement* pada Desember 1991 dan juga *Agreement on Denuclearization of the Korean Peninsula* pada Februari 1992. Fase ini juga ditandai dengan bergabungnya Korea Selatan dan Korea Utara pada *United Nations* pada September 1991. Disisi lain, fase ini merupakan

fase dimana adanya perubahan politik di Perang Dingin serta meningkatnya hubungan Korea Selatan dengan beberapa Negara Komunis yang ada di Eropa Timur dan juga di Asia dan diikuti dengan pertumbuhan ekonominya. Pada fase ini, sebuah momen yang bersejarah terjadi yaitu runtuhnya Uni Soviet yang menandakan berakhirnya Perang Dingin.

3. Fase Ketiga

Fase ketiga merupakan fase dimana ekonomi Korea Utara mulai terbuka dan disertai dengan memuncaknya kekuatan politik pada pertemuan yang terjadi pada Juni 2000. Fase ini juga ditandai dengan diadakannya sebuah pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Korea Selatan yaitu Kim Dae-Jung dengan Presiden Korea Utara yaitu Kim Jong-II pada Inter-Korean Summit.

4. Fase Keempat

Fase keempat diawali dengan mengarahnya hubungan Korea Selatan dan Korea Utara ke periode dengan tingkat intensitas hubungan ekonomi di Semenanjung Korea dan disertai terjadinya dialog antar Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, Amerik Serikat serta Rusia yang merupakan anggota dari *Six-Party Talks* (Armstrong, 2006).

Pada Agustus 1970, Presiden Park Chung Hee memiliki niatan untuk menyiptakan kondisi agar kedua Korea dapat bersatu. Kemudian, Perdana Menteri Kim II Sung mengumumkan platform dengan tujuan untuk menyatukan dua pemerintah didalam konfederasi pada April 1971. Salah satu alasannya adalah isu kemanusiaan yang terjadi di Korea Selatan dan Korea Utara. Ada banyak kasus mengenai keluarga yang

terpisah semenjak terpecahnya Korea pasca Perang Dunia II. Oleh karena itu, Palang Merah Korea Selatan menginginkan terciptanya dialog serta diskusi yang membahas mengenai isu kemanusiaan.

Kemudian, perwakilan Palang Merah dari kedua Korea memutuskan untuk mengumumkan pernyataan satu arah yang akan mengakomodasi pertemuan persiapan sementara kepada publik. Setelah itu, sebuah perjanjian diumumkan kepada publik mengenai Kim Yongju yang menjabat sebagai Direktur Organisasi Partai Buruh Korea dan Perdana Menteri Kim serta Yi Hurak yang menjabat sebagai Kepala Intelijen Pusat Korea yang saat itu secara diam-diam mengunjungi Pyongyang.

Pada dasarnya ada tiga dasar dan juga prinsip reunifikasi yaitu *Self-reliance, Peace and National Solidarity*. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan koordinasi antara Korea Selatan dan Korea Utara dengan tujuan untuk menghubungkan kembali saluran telepon secara langsung dari Seoul dan Pyongyang serta berkomitmen untuk tidak saling menuduh antar satu sama lain (Kim D. K., 2005, p. 166).

Diskusi pertama yang dilakukan oleh Korea Utara serta Korea Selatan dilaksanakan di Pyongyang pada tanggal 30 Agustus 1972. Momen tersebut merupakan momen pertama kali bagi delegasi Korea Selatan melintasi daerah perbatasan Korea secara resmi. Diskusi ini dilanjutkan dengan kedatangan Presiden Korea Utara ke Seoul untuk mengadakan pertemuan. Namun, pertemuan dan diskusi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan yang bersifat substansial. Salah satu contoh gagalnya kesepakatan antar Korea adalah ketika mengusulkan

diskusi mengenai masalah waktu serta lokasi untuk mengadakan reuni bagi keluarga yang terpisah.

Disisi lain, ada masalah yang paling mendasar yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu seperti prinsip-prinsip politik mengenai penghapusan hokum anti-Komunis di Selatan. Pada akhirnya, kunjungan serta diskusi timbale balik antara Korea Selatan dan Korea Selatan tidak berhasil mencapai kesepakatan yang efektif. Meskipun demikian, kedua Korea kembali mengadakan pertemuan yang terjadi pada Agustus 1973. Kim Yongju yang menjabat sebagai ketua dari Komite Koordinasi antara Korea Selatan dan Korea Utara memutuskan untuk menanggukhan diskusi dan mengumumkan hal tersebut ke publik. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap rezim Yusin terhadap Kim Dae Jung ketika dia berada pada pengasingan di Jepang (Kim D. K., 2005, p. 167).

Setelah itu, hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara dimulai ketika terjadinya perubahan pemerintahan di Korea Selatan yang terjadi pada tahun 1998. *Sunshine Policy* merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Kim Dae-Jung, Presiden Kim Dae-Jung menawarkan untuk mengadakan Dialog Tingkat Tinggi ke Korea Utara dengan tujuan untuk membuat beberapa perubahan bagi Korea. Pada Juni 2000, dilaksanakannya pertemuan puncak pertama antar Korea Selatan dan Korea Utara. Para pemimpin Korea bersepakat untuk menyetujui Deklarasi bersama Utara-Selatan di Pyongyang pada 15 Juni 2000 (Dae, 2000). *Sunshine Policy* yang digunakan oleh Korea Selatan demi menciptakan stabilitas telah gagal. Hal tersebut terbukti karena tidak ada perubahan serta resep positif yang diberikan oleh Korea Utara. Bantuan yang diberikan oleh Korea Selatan ke Korea Utara selama adminstrasi Kim Dae-Jung - Roh Moo-Hyun

sejak tahun 1998-2008 juga gagal menciptakan perubahan bagi orang-orang miskin di Korea Utara (Popeski).

Pada tahun 2007, Presiden Korea Selatan kembali mengunjungi Korea Utara. Pertemuan tersebut dilakukan oleh 6 pihak yaitu Amerika Serikat, China, Rusia, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara. Keenam pihak tersebut mencoba meyakinkan Korea Utara untuk mengakhiri program nuklirnya dengan mendapatkan beberapa bantuan seperti bantuan ekonomi serta bantuan energi dengan tujuan untuk mengakhiri isolasi diplomatik Korea Utara. Kemudian, pada Maret 2010 Korea Selatan beranggapan bahwa Korea Utara telah menghancurkan kapal perang milik Korea Selatan dan telah membunuh sekitar 46 pelaut Korea Selatan meskipun Korea Utara mengklaim bahwa mereka tidak bersalah.

Pada November 2010, Korea Utara melancarkan serangan untuk pertama kalinya dengan cara menembaki 170 peluru artileri yang berlokasi di Yeonpyeong. Ada sekitar empat orang tewas termasuk warga sipil. Pada dasarnya, Korea Utara telah lama mengembangkan senjata nuklirnya tetapi Korea Utara dibawah kepemimpinan Presiden Kim Jong-Un telah melakukan uji coba nuklir untuk keenam kalinya dan yang terbesar dilakukan pada September 2017 (Yesinta, 2018).